

Fenomena Pendidikan Inklusif, Antara Kebijakan dan Kenyataan

Ria Nurhayati^{1*}

¹PGMI, STAI Yogyakarta

* Corresponding Author. E-mail: rianurhayati07@gmail.com

Submitted: 11-01-2024

Accepted: 16-01-2024

Published: 16-01-2024

Abstrak

Pendidikan inklusif dapat berhasil sesuai tujuan ketika dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai kebijakan dan didukung dengan fasilitas yang memadai. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dilaksanakan di 10 sekolah di kabupaten Gunungkidul dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini terdapat sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang belum melaksanakan pendidikan inklusi sesuai dengan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Proses identifikasi dan assessment yang seharusnya menjadi poin penting ternyata tidak dilakukan beberapa sekolah. Penyebab tidak dilakukan identifikasi dan asesmen adalah karena factor kurangnya pengetahuan guru tentang pendidikan inklusi dan orang tua yang masih belum bisa menerima jika anaknya di identifikasi sebagai anak berkebutuhan khusus. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengadakan sosialisasi baik secara personal maupun kelembagaan kepada orang tua dan juga guru. Pemberian intensif kepada guru di kelas inklusif juga dilakukan sebagai reward dari tugas mengajar yang lebih berat dari pada guru di kelas regular.

Kata kunci: kebutuhan khusus, pendidikan inklusif, kebijakan.

Abstract

Inclusive education will succeed according to its objectives when it is implemented according to policies and supported by adequate facilities. This research is field research carried out in 10 elementary schools in the Gunungkidul district with observations, interviews, and documentation. This study's results show that some schools providing inclusive education have not implemented inclusive education by following established government policies. The process of identification and assessment which should be an important point was not carried out by several schools. The reason for not carrying out identification and assessment is due to teachers' lack of knowledge about inclusive education and parents who still cannot accept that their child is identified as a child with special needs. Some things that can be done to overcome these problems are to conduct personal and institutional outreach to parents and teachers. Intensive giving to teachers in inclusive classes is also carried out as a reward for heavier teaching assignments than teachers in regular classes.

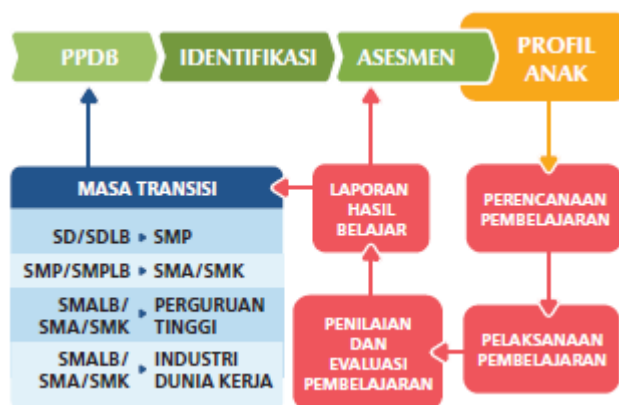
Keywords: *special needs, inclusive education, policies.*

1. PENDAHULUAN

Layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di masyarakat masih sangat terbatas. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak sekolah karena keterbatasan biaya, akses ke sekolah dan factor lainnya. Sedangkan anak berkebutuhan khusus tetap berhak mendapatkan hak sebagai warga negara dan hak sebagai manusia yaitu mendapatkan Pendidikan yang layak. Pemerintah Indonesia melalui kementerian Pendidikan nasional, no. 70 tahun 2009 pemerintah telah mengatur pelaksanaan Pendidikan inklusi di semua jenjang Pendidikan. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa

“Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.”(Kementerian Pendidikan Nasional 2009).

Dari penjelasan tersebut tersurat bahwa tujuan dari pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik, bagaimanapun keadaannya agar pendidikan dapat merata ke seluruh kalangan masyarakat serta mewujudkan pendidikan yang menghargai keanekaragaman peserta didik. Pedoman pelaksanaan pendidikan inklusif telah ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pendidikan inklusif pada setiap jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMS hingga perguruan tinggi. Pada jenjang Pendidikan dasar, dijelaskan bahwa skema pelaksanaan Pendidikan inklusi adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Pelaksanaan Pendidikan inklusi tingkat sekolah dasar.

(Direktorat Sekolah Dasar, 2022)

Berdasarkan alur pelaksanaan pendidikan inklusif di atas, proses awal setelah penerimaan peserta didik baru adalah proses identifikasi. Proses identifikasi peserta didik adalah kegiatan untuk menemukan keragaman dari peserta didik yang dapat dilakukan dengan wawancara, tes informal, observasi maupun pemeriksaan dokumen administratif. Dalam hal ini, proses identifikasi bertujuan untuk mengetahui peserta didik yang diduga sebagai anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya dilakukan proses assessment terhadap anak yang diduga sebagai anak berkebutuhan khusus. Proses assesmen ini bertujuan

untuk mengetahui informasi tentang kemampuan anak baik akademik maupun non akademik dan kebutuhan khususnya secara lengkap, akurat dan obyektif. Hasil asesmen kemudian digunakan oleh guru sebagai panduan untuk menyusun perencanaan pembelajaran dan program layanan khusus. Pada proses identifikasi dan asesmen sangat dibutuhkan peran orang tua untuk memberikan keterangan dan informasi tentang anak (Direktorat Sekolah Dasar 2022).

Peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa ada sekolah yang di dalamnya terdapat anak berkebutuhan khusus, namun sekolah tidak melakukan asesmen terhadap anak tersebut. Mengingat bahwa proses asesmen anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif sangat penting dilakukan, namun ternyata malah ada sekolah yang menolak untuk mengasesmen anak didiknya, hal ini tentu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Tidak hanya itu, peneliti menemukan beberapa permasalahan terkait pelaksanaan Pendidikan inklusi pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Gunungkidul. Maka dari itu penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan yang ada pada pelaksanaan Pendidikan inklusi di Kabupaten Gunungkidul serta bagaimana permasalahan – permasalahan tersebut dapat diatasi sehingga pelaksanaan pendidikan inklusi dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditentukan.

Tidak hanya di Indonesia, pendidikan inklusif juga merupakan isu yang selalu dibicarakan di dunia internasional. Berbagai penelitian dilakukan untuk menemukan formulasi dan kebijakan yang paling tepat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Peneliti telah melakukan studi pustaka untuk mengetahui berbagai pembahasan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian tentang pendidikan inklusif yang selama ini telah dilakukan lebih banyak membahas tentang pelaksanaan dan manajemen tentang Pendidikan inklusif. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Iryna Sadova, menjelaskan bahwa Pendidikan inklusif merupakan fenomena baru di bidang pendidikan yang ada di Ukraina. Menurutnya berbagai hal telah dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif namun harus tetap fokus pada tujuannya yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk bersosialisasi. (Sadova 2019) Penelitian tentang Pendidikan inklusif pada jenjang Pendidikan tinggi dilakukan oleh Ahsan Romadlon Junaidi*, Dimas Arif Dewantoro, Pravisni Shanti, Gama Rahmita yang berjudul *Inclusive Education in Higher Education: Baseline Study at Universitas Negeri Malang* dan diterbitkan pada Jurnal of ICSAR. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Pendidikan inklusif yang berlangsung di Universitas Negeri Malang yang didalamnya membahas tentang kebijakan Pendidikan inklusi, budaya inklusi dan praktek Pendidikan inklusi yang dilaksanakan seluruh civitas akademika di Universitas Negeri Malang (Junaidi et al. 2022).

Penelitian berjudul *Inclusive Education Issues and Challenges of Inclusive Education*, yang dilakukan oleh Dr. Chandrasasa G, menggambarkan tentang masalah dan tantangan yang ditemui dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusi yang difokuskan pada aspek kurikulum pembelajarannya. Pada penelitiannya Dr. Chandrasasa mengelompokkan permasalahan pendidikan inklusif menjadi beberapa kelompok yaitu masalah sikap, sosial, infrastruktur, pendidikan dan ekonomi. Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif juga datang dari berbagai aspek seperti penyesuaian kurikulum dan sekolah, pelatihan untuk guru pendidikan inklusif, serta proses evaluasi yang sesuai dengan kelas inklusif (Dr. Chandrasasa G 2022). Penelitian yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar* yang dilakukan oleh Robiatul Munajah, Arita Marini, Mohamad Syarif Sumantri, membahas factor penghambat, pendukung dan upaya yang telah dilaksanakan dalam pelaksanaan

Pendidikan inklusif di sekolah dasar negeri 13 Pandegelang. Beberapa upaya yang telah dilakukan sekolah untuk memaksimalkan Pendidikan inklusif adalah melakukan sosialisasi oleh komite kepada orang tua, pelatihan penanganan Anak berkebutuhan khusus, pelatihan pengembangan kurikulum Pendidikan inklusif serta melengkapi sarana pendukung untuk meningkatkan pelayanan Pendidikan inklusif di SD N 13 Pandegelang (Munajah, Marini, and Sumantri 2021).

Permasalahan pada pelaksanaan pendidikan inklusif ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Nissa Tarnoto dengan judul Permasalahan- Permasalahan yang dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi pada Tingkat SD yaitu Kurangnya Kompetensi guru pada kelas inklusi, kurangnya kepedulian orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, Kurangnya Kerjasama dari berbagai pihak serta banyaknya jumlah siswa berkebutuhan khusus yang ada dalam satu kelas (Tarnoto 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Dr Archana S. S. dengan judul *Analysis Of Inclusive Practice Of Regular Schools For Promoting Inclusive Education*. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwasanya pelaksanaan pendidikan inklusif di India dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas dan kelas inklusif disesuaikan dengan kebutuhan siswa inklusif (Dr Archana S. S. 2022).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Bahri yang berjudul Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar mendeskripsikan delapan aspek ruang lingkup manajemen pendidikan inklusi yang terdapat di SDN Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Delapan aspek tersebut adalah Kurikulum, Budaya dan lingkungan, sarana prasarana, peserta didik, tenaga pendidik, layanan khusus pembiayaan dan humas (Bahri 2022). Penelitian *rd* yang dilakukan oleh Munawif Yusuf, Sunardi, Maman, Rachman dan Haryono berjudul *The Development Of Inclusive Education Management Model To Improve Principals And Teachers Performance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pendidikan inklusif, menyusun model manajemen pendidikan inklusif kemudian mengujinya dan hasilnya efektif serta dapat digunakan sebagai panduan untuk manajemen pendidikan inklusif di sekolah dasar di Indonesia (Yusuf et al. 2014).

Model pembelajaran bagi siswa inklusif telah diteliti salah satunya oleh Suzana Harun, Zaharah Hussin, Abdul Muhsin dan Sulaiman dengan judul *The Teaching of Islamic Education Teachers in inclusive Classes: Current Phenomenon in Forming a New Teaching Model*. Penelitian ini membahas bagaimana guru menyampaikan pendidikan agama islam dalam kelas inklusif (Harun, Hussin, and Sulaiman 2021). Selain itu Mumpuniarti, Fathurahman dan Sukinah melakukan penelitian RnD yang menghasilkan modul dengan 7 tema yang bertujuan agar dapat dipergunakan sebagai media asesmen ABK di sekolah inklusif. penelitian ini mengembangkan modul dengan berbagai metode pembelajaran untuk menyampaikan nilai seperti menggunakan fabel kadal dan macan tutul, lagu Pelangi- Pelangi dan lain sebagainya (Mumpuniarti 2014). Evaluasi kurikulum merupakan salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif seperti penelitian yang dilakukan oleh Nasarudin, Ahmad Helwani dan Syafii berjudul evaluasi kurikulum madrasah inklusif pada era kenormalan baru yang dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Inklusi di Lombok Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini membahas bagaimana pola interakisi guru, pemahaman guru tentang kurikulum, sumber dana media pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran serta proses pembelajaran yang dilakukan di kelas inklusif MtS Lombok Nusa Tenggara Barat

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Mrs. Vidhyashree P yang berjudul *Sustainable Development of Inclusive education in India: Issues and challenges*.

Penelitian ini menganalisis isu dan tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif serta melakukan pengukuran implementasi kebijakan apakah sudah dilaksanakan sesuai aturan atau masih perlu pembenahan dan evaluasi lebih lanjut (Mrs. Vidhyashree P 2019). Penelitian tentang efektifitas kebijakan pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar dilakukan oleh Eddy Junaedi. Pembahasan dimulai dengan menjelaskan bagaimana kebijakan dibentuk, bagaimana kegiatan sosialisasi kebijakan dilakukan, program apa saja yang direncanakan dalam pendidikan inklusif, bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif, bagaimana upaya pemantauan yang dilakukan dan mencari tahu seberapa pentingnya pendidikan inklusif dilakukan. Aspek- aspek tersebut diteliti untuk mengetahui efektifitas kebijakan dan pelaksanaan pendidikan inklusif. dan hasil penelitian ini adalah masalah yang didapati adalah guru, sarana prasarana, pendanaan dan keterlibatan dinas, dukungan kepala sekolah dengan pihak lain serta efektifitas pengawasan sekolah inklusif (Junaidi et al. 2022).

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena dari penelitian sebelumnya permasalahan dan hambatan pelaksanaan pendidikan karakter cenderung dilihat dari sisi kebijakan di sekolah saja. Dalam penelitian ini akan membahas fenomena pelaksanaan pendidikan inklusi pada tingkat sekolah dasar yang dibahas dari sudut pandang kebijakan, fasilitas pendukung pelaksanaan pendidikan inklusif serta dukungan dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Melalui penelitian ini penulis dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di Gunungkidul, baik secara teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan teori- teori tentang pelaksanaan pendidikan inklusif. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi agar sesuai alur yang telah ditetapkan serta mengembangkan kebijakan-kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi masyarakat dan orang tua dengan anak berkebutuhan khusus.

2. METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu mendeskripsikan suatu fakta atau fenomena, data dan objek penelitian secara sistematis dan sesuai situasi alamiah. Hasil penelitian dapat berubah sesuai kondisi di lapangan dan dituliskan dalam kalimat deskriptif. (Anggito and Setiawan 2018) Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah 11 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Gunungkidul yaitu: SD N 1 Tambakromo Ponjong, SMA N 1 Tanjungsari, SDN Banombo, SDIT AL I'tisham, SDM Kemadang, SD N 2 Tambakromo, MIN 7 Gunungkidul, SD N Kemiri 2, SD Umbulrejo, SMP Ekakapti. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada tahap observasi, peneliti mengamati siswa berkebutuhan khusus dan fasilitas yang ada pada sekolah tersebut. Proses wawancara dilakukan kepada kepala sekolah dan guru yang mengajar di kelas inklusif. Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan mendokumentasikan informasi yang diperoleh saat wawancara, observasi dan dan mengumpulkan kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan pendidikan inklusif.

Analisis dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan triangulasi data dengan membandingkan penelitian terdahulu, teori dan hasil penemuan dari penelitian. Dalam penelitian. Proses analisis data diawali dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya adalah proses reduksi data yaitu mengelompokkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus penelitian. Setelah data dikelompokkan kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tiga pilar dalam pendidikan adalah sekolah, masyarakat (keluarga) dan pemerintah melalui kebijakan- kebijakannya dalam pendidikan. Kerjasama dari ketiga pilar tersebut sangat dibutuhkan untuk menciptakan inovasi dan kebijakan- kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan inklusi.

3.1. Kebijakan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif

Berdasarkan penelitian ditemukan beberapa poin permasalahan yang terkait dengan tahapan pelaksanaan pendidikan inklusif tersebut yaitu:

a. Sekolah Tidak Melaksanakan Tahap Identifikasi dan Asesmen

Tahapan pelaksanaan pendidikan inklusif telah dijelaskan pada pendahuluan yaitu dimulai dengan melakukan proses identifikasi, asesmen, menentukan rencana dan evaluasi pembelajaran. Agar dapat berjalan dengan baik tentunya tahapan-tahapan tersebut harus dilaksanakan, namun tidak demikian dengan realitas di lapangan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan pada proses identifikasi anak berkebutuhan khusus adalah menghimpun data anak, menganalisis data dan mengklasifikasikan anak, menginformasikan hasil analisis dan klasifikasi, menyelenggarakan pembahasan kasus, dan terakhir adalah Menyusun laporan hasil pembahasan kasus. Tahap selanjutnya adalah asesmen yang dilakukan pada beberapa aspek yaitu asesmen akademik, asesmen sensorik dan motorik, serta asesmen psikologis, emosi dan sosial. Langkah selanjutnya adalah menentukan rencana pembelajaran yang dilakukan dengan menyesuaikan hasil asesmen dan kurikulum, sehingga terbentuk program pembelajaran individual (Garnida 2018).

Hasil penelitian menunjukkan ada dua sekolah yang tidak melaksanakan proses identifikasi dan asesmen tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu: adanya kekhawatiran pihak sekolah jika terdapat siswa berkebutuhan khusus di sekolahnya maka akan mengurangi rasa percaya wali murid lain. Selain itu budaya yang masih berkembang di masyarakat adalah budaya orang tua yang malu jika memiliki anak berkebutuhan khusus. Faktor lain adalah kekhawatiran tentang anggapan jika anak normal belajar dalam satu temat yang sama dengan anak berkebutuhan khusus maka guru akan focus membimbing anak yang berkebutuhan khusus sehingga anak- anak normal akan diabaikan. Namun selain itu sekolah belum memiliki kemampuan dan sumber daya manusia untuk melakukan identifikasi dan analisis peserta didik baru. Sehingga seluruh peserta didik yang mendaftar dan selama kuota masih cukup maka akan diterima dan diperlakukan sama dengan peserta didik lainnya.

Sekolah yang belum melakukan identifikasi dan asesmen terhadap peserta didik yang teridentifikasi memiliki kekurangan atau kelebihan potensi perlu meninjau kembali pentingnya kedua proses tersebut. Kedua proses tersebut sangat perlu dilakukan sebagai langkah awal untuk menentukan program pembelajaran bagi anak yang teridentifikasi sebagai anak berkebutuhan khusus (Arriani and Dkk 2022). Jika dirasa belum mampu melakukan identifikasi dengan sumber daya intern dari sekolah tersebut, sekolah dapat bekerja sama dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif lainnya atau bekerja sama dengan sekolah luar biasa yang pendidikannya tentu lebih paham dengan perkembangan anak berkebutuhan khusus. Setelah melakukan identifikasi dan menemukan anak berkebutuhan khusus, sekolah dapat melakukan pendekatan secara personal kepada orang tua dari anak tersebut untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus.

Sedangkan orang tua seharusnya dapat memberikan informasi yang sejujur-jujurnya tentang keadaan anaknya sehingga sekolah dapat menentuka proses selanjutnya yaitu Menyusun kebutuhan dan program pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik berkebutuhan khusus tersebut.

b. Kurikulum Disamakan

Kurikulum pendidikan inklusif menggunakan tiga jenis kurikulum yaitu kurikulum umu, kurikulum modifikasi, dan kurikulum individual. Sebuah kurikulum terdiri dari beberapa perangkat seperti silabus, rencana program pembelajaran, bahan ajar dan evaluasinya. Implikasi dari penggunaan berbagai model kurikulum tersebut tentu salah satunya adalah guru perlu menyiapkan evaluasi yang fleksibel sesuai kebutuhan peserta didik.(Garnida, 2018) Dalam peraturan pemerintah nomer 70 tahun 2009 pasal 8 ayat 5 dinyatakan bahwa peserta didik yang menyelesaikan pendidikannya sesuai kurikulum yang dikembangkan satuan Pendidikan di bawah standar nasional pendidikan maka akan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan Pendidikan yang bersangkutan.(Kementrian Pendidikan Nasional 2009)

Data di lapangan menunjukkan bahwa dari sekolah yang diteliti, seluruhnya masih menggunakan kurikulum umum yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan materi, strategi, metode pembelajarannya dan penialiannya. Untuk bahan dan sumber belajar masih menggunakan seperti materi untuk peserta didik yang normal. Untuk kurikulum individual belum diterapkan di seluruh sekolah yang diteliti. Karena untuk menetapkan program individual sekolah perlu melakukan identifikasi dan asesemen serta memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk Menyusun program pembelajaran individual tersebut. Pada kegiatan evaluasi, ada perlakuan khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus yaitu mendapatkan pendampingan atau dipisah dengan peserta didik normal. Saat pembelajaran olahraga peserta didik dengan kebutuhan khusus juga diberikan keringanan untuk tidak mengikuti dan diganti dengan materi lain.

Pada bidang kurikulum, sekolah dapat melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait perkembangan anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah tersebut untuk menyusun program pembelajaran individual sebagai bentuk layanan pembelajaran peserta didik dengan kebutuhan khusus yang sesuai dengan kebutuhannya. Sekolah juga perlu menyesuaikan proses penilaian bahkan kelulusan peserta didik karena dalam permendikas telah dijelaskan bahwa peserta didik tidak harus diluluskan dengan standar nasional, namun dengan standar yang telah ditentukan Lembaga pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dimana anak tersebut sekolah (Kementrian Pendidikan Nasional 2009). Namun hal ini juga perlu disampaikan kepada orang tua peserta didik karena masih banyak orang tua yang menganggap jika anaknya disekolahkan di sekolah umum maka akan mendapatkan surat tanda tamat belajar atau ijazah sama dengan peserta didik normal lain yang sekolah di sekolah tersebut.

c. Belum Adanya Guru Pendamping Khusus

Keberadaan guru pendamping sangat penting dalam proses pembelajaran di kelas inklusif. Pasal 10 Permendiknas Nomer 70 tahun 2009 menyatakan bahwa pemerintah wajib menyediakan guru pembimbing khusus bagi sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Sedangkan sekolah yang tidak ditunjuk pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif juga wajib menyediakan guru pendamping khusus untuk kelas yang terdapat peserta

didik berkebutuhan khusus. Sejalan dengan kewajiban untuk menyediakan guru pendidikan khusus di sekolah inklusif, pemerintah juga berkewajiban untuk meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Peningkatan kompetensi tersebut dapat dilakukan melalui: 1) Pusat Pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, 2) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, 3) Perguruan tinggi, 4) Lembaga Pendidikan dan pelatihan lainnya serta 5) melalui kelompok kerja guru/ Kepala Sekolah, kelompok kerja pengawas sekolah, musyawarah guru mata pelajaran, musyawarah kepalas sekolah, musyawarah pengawas sekolah dan sejenisnya. (Kementrian Pendidikan Nasional 2009)

Kirillova E., Ibragimov G dengan penelitiannya yang berjudul *The inclusive competence of future teachers* membahas tentang pentingnya kompetensi pedagogik bagi guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Artikel ini menyampaikan bahwa guru tidak hanya memerlukan pengetahuan tentang keilmuannya saja, namun dalam pendidikan inklusif guru perlu menguasai aspek pedagogik dan aspek psikologis juga tegasnya. (E.A.Kirillova and G. Ibragimov 2016)

Fakta dari penelitian yang telah dilakukan, sebagai sekolah sudah memfasilitasi guru dalam bidang pendidikan khusus seperti mengikuti pelatihan, seminar dan workshop. Namun masih ada sekolah yang belum memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi guru pada bidang pendidikan khusus. Jadi selama ini guru yang sekedar *learning by doing*, menganalisis kebutuhan yang diperlukan peserta didik yang dapat dipenuhi oleh guru. Seperti di MIN 7 Gunungkidul, yang terdapat anak dengan keterlambatan belajar. Saat ini anak tersebut berada di kelas 5 namun untuk sekedar menulis huruf masih mengalami kesulitan. Untuk mengatasi hal ini, guru membuatkan lembar kerja yang di dalamnya sudah tertulis huruf dengan garis putus-putus. Walaupun mengalami keterlambatan belajar, anak tersebut tetap semangat untuk sekolah, sehingga guru pun juga dengan semangat mendampingi anak tersebut meskipun dengan fasilitas dan kompetensi yang secukupnya.

Dari kejadian tersebut beberapa hal dapat dilakukan sekolah untuk memenuhi kebutuhan guru pendamping khusus, seperti: 1) bekerjasama dengan sekolah luar biasa (SLB) terdekat untuk bersedia mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus atau sekedar memberikan pelatihan kepada guru yang mengajar di kelas inklusif. 2) Menjalani kerja sama dengan Lembaga independen yang bergerak dalam bidang pendidikan inklusif untuk mendampingi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. 3) Berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dalam upaya mengadakan pelatihan atau workshop guru pendamping khusus.

Beberapa hal tersebut dapat dilakukan sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan guru pendamping khusus. Karena untuk mendapatkan fasilitas peningkatan guru di bidang pendidikan khusus dari pemerintah, harus melalui mekanisme yang tidak mudah dan perlu memenuhi kriteria administrasi yang telah ditetapkan.

d. Bukan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Namun Terdapat Siswa Berkebutuhan Khusus.

Untuk menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pemerintah mensyaratkan beberapa kriteria seperti: kesiapan sekolah untuk melaksanakan Pendidikan inklusif, adanya siswa berkebutuhan khusus, tersedianya guru pendamping khusus, memiliki komitmen penintasan wajib belajar, memiliki jaringan kerja sama dengan Lembaga lain yang relevan, tersedia sarana penunjang, pihak sekolah telah mendapatkan sosialisasi tentang Pendidikan inklusif serta memenuhi kriteria administrasi yang telah ditetapkan masing-masing wilayah. (Rasmitadila 2020)

Data penelitian terdapat 3 sekolah yaitu SD IT Al I'tisham, MIN 7 Gunungkidul dan SD Tambakromo yang menyatakan bahwa sekolah mereka belum sebagai sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif. Walaupun bukan penyelenggara Pendidikan inklusif namun di sekolah tersebut terdapat peserta didik berkebutuhan khusus. Mereka tetap menerima siswa berkebutuhan khusus karena alasan komitmen untuk menyelenggarakan Pendidikan untuk semua siswa tanpa kecuali. Namun di sisi lain karena belum terdaftar sebagai sekolah penyelenggara Pendidikan inklusi, maka mereka belum mendapatkan fasilitas dan akomodasi yang mungkin dapat didapatkan dari pemerintah sebagai sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif. Faktor lain kemungkinan karena belum memenuhi kriteria secara administrasi sehingga sekolah-sekolah tersebut belum mau mendaftarkan diri sebagai sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif.

Kebijakan yang dapat dilakukan adalah mempertimbangkan manfaat dan kemaslahatan yang diperoleh bagi sekolah, pendidik, peserta didik, orang tua bahkan masyarakat di sekitar sekolah tersebut. Jika sekolah-sekolah tersebut secara legal mendaftarkan sebagai sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif.

3.2. Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Inklusif

Peraturan tentang fasilitas dan akomodasi peserta didik penyandang disabilitas telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020. Di dalamnya disebutkan bahwa akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmat atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. (Pemerintah Indonesia, 2020). Telah dijelaskan bahwa fasilitas untuk pendukung pelaksanaan pendidikan inklusif tidak harus baru namun dapat dimodifikasi dari fasilitas yang telah ada. Namun beda halnya dengan sekolah yang memang belum menyediakan fasilitas apapun yang dapat dipergunakan oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk mewujudkan fasilitas pendukung, sekolah tidak dibebani untuk mengadakannya secara mandiri, namun dapat dilaksanakan dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah. Mekanisme fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak diawali dengan menyampaikan pelaporan data peserta didik penyandang disabilitas kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah, kemudian pemerintah akan menetapkan Lembaga penyelenggara pendidikan untuk mendapatkan fasilitas penyediaan akomodasi yang layak sesuai laporan. Selain itu Lembaga penyelenggara pendidikan yang belum memiliki peserta didik penyandang disabilitas juga dapat mengajukan permohonan akomodasi yang layak. (Pemerintah Indonesia 2020)

Pada penelitian yang dilakukan oleh FR Ackah dan Joyce menemukan bahwa Sebagian besar fasilitas fisik yang terdapat di sekolah inklusi belum sesuai dengan siswa berkebutuhan khusus seperti fasilitas olahraga. Upaya yang telah dilakukan sekolah adalah meminta kepada pemerintah setempat untuk mendukung adanya perbaikan fasilitas dan memodifikasi fasilitas yang ada kemudian disesuaikan dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus karena hal itu akan berdampak pada keberhasilan pendidikan inklusif. (Francis R. Ackah-Jnr and Joyce B. Danso 2019)

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan inklusif secara umum akan lebih besar dari sekolah umum, hal ini disebabkan karena di sekolah inklusif tentu memerlukan fasilitas dan penanganan yang lebih dari sekolah umum. Sedangkan sumber pembiayaan dapat berasal dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, dari pihak swasta maupun dari orang tua peserta didik. Berikut ini adalah tabel yang berisi tentang jenis kebutuhan anak berkebutuhan khusus serta fasilitas yang dimiliki sekolah masing-masing.

Tabel 1. Fasilitas di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

No.	Nama Sekolah	Jenis Disabilitas	Fasilitas yang dimiliki
1	SD N 1 Tambakromo Ponjong	Autis (Belum di identifikasi dan asemenen)	Belum ada
2	SMA N 1 Tanjungsari	Psikis, teriak- teriak	Belum ada
3	SDN Banombo	Tunanetra	<ul style="list-style-type: none"> • Guiding Block • pegangan tembok
4	SDIT AL I'tisham	Autis Tunawicara	Belum ada, kadang dilakukan di kelas khusus
5	SDM Kemadang	Tunadaksa	<ul style="list-style-type: none"> • Guiding Block • pegangan besi
6	SD N 2 Tambakromo	Ada, belum diasesmen keterlambatan belajar	<ul style="list-style-type: none"> • Guiding Block • Ibunya ikut masuk saat pembelajaran
7	MIN 7 Gunungkidul	Keterlambatan belajar	<ul style="list-style-type: none"> • Kertas khusus dengan garis bantu
8	SD N Kemiri 2	Keterlambatan belajar	Belum ada
9	SD UMBULREJO	Tunarungu Keterlambatan belajar	<ul style="list-style-type: none"> • Membawa sendiri dari rumah, • Guiding Block
10	SMP EKAKAPTI	Tunanetra Tunarungu	<ul style="list-style-type: none"> • Guiding Block, • Pegangan, • Reglet dan Syllus.

Dari tabel di atas terlihat bahwa fasilitas yang dimiliki sangat minim bahkan ada sekolah yang sama sekali belum memiliki fasilitas pendukung penyelenggaraan inklusif. Fasilitas yang paling umum dimiliki adalah adanya paving blok dan pegangan dinding. Namun hal ini kenyataannya tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Fasilitas peserta didik seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan masing- masing. Seperi anak dengan gangguan tunanetra berbeda kebutuhan dengan anak dengan

gangguan tunarungu dan lainnya. Fasilitas juga tidak hanya berupa layanan fisik seperti paving blok, dan pegangan dinding namun juga diperlukan layanan dalam bentuk fleksibilitas kurikulum dan pembelajaran.

Ketersediaan fasilitas sekolah penyelenggara pendidikan inklusif erat kaitannya dengan pendanaan yang ada di sekolah tersebut. Untuk sekolah dasar negeri, mereka hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah. Sedangkan untuk sekolah dasar swasta, salah satu sumber pendanaan adalah berasal dari orang tua peserta didik. Terkait fasilitas yang masih minim dan sangat penting untuk keberhasilan pendidikan inklusif seharusnya sekolah lebih aktif untuk melakukan identifikasi anak sebagai peserta didik berkebutuhan khusus dan selanjutnya dapat melakukan permohonan untuk diberikan fasilitas dari pemerintah pusat maupun daerah.

3.3. Dukungan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus

Dukungan berbagai pihak tentu sangat diperlukan dalam upaya menyukseskan pelaksanaan Pendidikan inklusif agar Pendidikan dapat dijangkau oleh semua pihak. Pelaksanaan pendidikan inklusif juga diteliti oleh M. Pratinigrum dengan judul Fenomena penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam penelitian ini membahas bahwasanya penyelenggaraan pendidikan inklusif belum sesuai baik dari segi siswa, guru, sarana prasarana, pihak orang tua maupun pemerintah. (Pratinigrum 2010)

a. Lingkungan Keluarga

Pendidikan pertama bagi seorang anak adalah Pendidikan di lingkungan keluarga. Disadari atau tidak, anak sangat mudah meniru dan mencontoh perilaku, Tindakan, emosi psikologis orang tuanya. Anak yang memiliki kecerdasan tidak terbentuk semerta-merta karena bawaan lahir, namun perlu campur tangan orang tua untuk mengasah kemampuan anak tersebut. Selain potensi anak, suasana di dalam rumah juga perlu diciptakan menjadi lebih nyaman, bersahabat, hangat dan demokratis agar anak dan orang tuanya berinteraksi mengoptimalkan potensi anak. (Subini 2014) *Understanding of inclusive education practices among parents in Ghana* (2019), adalah penelitian yang dilakukan oleh M Amponteng, MP Opoku, E Agyei-Okyere, SA Afriyie, R Tawiah yang berisi tentang peran orang tua dalam menyukseskan Pendidikan inklusif di Ghana. Dia menemukan bahwa tidak perbedaan peran antara orang tua dengan anak Berkebutuhan khusus dan anak biasa. Dan hal ini juga telah diatur dalam kebijakan Pendidikan inklusif di Ghana. (Amponteng and Peprah Opoku 2019)

Dalam penelitian ini, dukungan pihak keluarga terlihat dari kesadaran menyekolahkan anak mereka yang berkebutuhan khusus. Selain itu ada pula orang tua yang memberikan dukungan dengan mendampingi anaknya yang berkebutuhan khusus sampai di dalam kelas dan bahkan ikut dalam pembelajaran. Dukungan laian yang ditunjukkan orang tua adalah memberikan fasilitas kepada anaknya yang berkebutuhan khusus, seperti contoh yaitu anak tunarungu di SDN Umbulrejo, dia membawa sendiri alat bantu dengar dari rumah, karena memang di sekolah belum menyediakan fasilitas pendukung pembelajaran. Hal ini sangat bagus dan sangat membantu sekali dalam pelaksanaan Pendidikan karakter di tingkat SD.

Namun, pada kenyataannya tidak semua orang tua dapat memberikan dukungan kepada anaknya yang berkebutuhan khusus. Orang tua yang tidak peduli, cenderung membiarkan anaknya tumbuh apa adanya tanpa berusaha memberikan

layanan kepada anak berkebutuhan khusus. Contohnya di SD N 2 Tambakromo, orang tua tidak bersedia memberikan informasi terkait kegiatan dan riwayat Kesehatan anaknya sehingga hal ini menghambat sekolah untuk melakukan identifikasi dan asesmen terhadap anak tersebut.

Dukungan keluarga dapat diwujudkan dengan memberikan sosialisasi kepada orang tua terkait anak berkebutuhan khusus. Di daerah pinggiran banyak orang tua yang masih merasa malu dan merasa bahwa anak berkebutuhan khusus tidak dapat berkembang seperti anak normal. Pola pikir seperti ini perlu diluruskan bahwasanya anak berkebutuhan khusus adalah sama dengan anak normal hanya memang perlu perlakuan khusus untuk dapat berkembang optimal seperti anak normal. Sosialisasi kepada orang tua perlu disampaikan bukan hanya dari pihak sekolah, namun juga oleh Lembaga lain yang terkait dengan anak berkebutuhan khusus, seperti kementerian sosial, kementerian Kesehatan bahkan Lembaga independen yang bergerak dibidang anak berkebutuhan khusus. Memberikan motivasi dengan menampilkan kisah- kisah sukses anak berkebutuhan khusus juga perlu dilakukan agar orang tua dapat memotivasi diri dan anaknya untuk tetap semangat memiliki harapan seperti anak normal lainnya.

b. Lingkungan Sekolah

Pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah pada kenyataannya tidak selalu mulus dan tanpa hambatan. Kurangnya fasilitas, belum adanya guru pendamping, kurikulum yang masih sama, dan hambatan lainnya masih ditemukan dalam lapangan. Namun sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif harus tetap teguh pada tujuan memberikan Pendidikan yang layak bagi seluruh peserta didik walaupun dengan segala keterbatasannya. Dalam penelitian ini dukungan dari pihak sekolah yang telah dilakukan untuk keberlangsungan Pendidikan inklusif adalah berupa penyediaan fasilitas seperti *guiding block*, pegangan di sisi temok dan ada sekolah yang telah memiliki alat tulis Braille (Reglet dan Styllus). Selain itu beberapa sekolah juga telah memfasilitasi pendidikannya untuk mengikuti pelatihan guru pendamping khusus.

Penelitian yang dilakukan oleh Tian Wang, Meng Deng and Guoxiu Tian menggambarkan bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala sekolah pada sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif di China. Berdasarkan penelitian, mereka menemukan pelaksanaan Pendidikan inklusif. Dengan kepemimpinan yang baik maka kepala sekolah dapat menentukan kebijakan- kebijakan yang baik untuk sekolahnya, serta memberikan dukungan yang maksimal kepada guru- guru yang mengajar siswa berkebutuhan khusus di sekolahnya.(Wang, Deng, and Tian 2022) Beberapa alternatif yang dapat dilakukan sekolah untuk mengoptimalkan pelayanan kepada peserta didik berkebutuhan khusus adalah: 1) Menjalin kerja sama dengan sekolah luar biasa untuk memberikan pendampingan terhadap anak maupun guru di kelas inklusif. Karena tidak semua guru yang mengajar kelas inklusif memiliki kemampuan untuk mengajar peserta didik berkebutuhan khusus apalagi bersama-sama dengan anak normal dalam satu kelas. 2) Menyediakan kurikulum yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Penyediaan program pembelajaran individual perlu dilakukan agar peserta didik lain tetap dapat belajar dengan maksimal dan peserta didik yang berkebutuhan khusus juga dapat belajar sesuai kebutuhannya. 3) Sekolah menyelenggarakan kelas orang tua dengan motivator penyandang difabel sehingga orang tua tidak akan merasa malu lagi

dengan anaknya yang berkebutuhan khusus. 4) Memberikan intensif kepada guru yang mengajar di kelas inklusif. Beban kerja seorang guru di kelas inklusif tentu lebih besar jika dibandingkan dengan guru yang mengajar di kelas normal. Maka sekolah dan pemerintah perlu memberikan apresiasi dan reward untuk guru yang mengajar di kelas inklusif. 5) Bekerja sama dengan komite sekolah dan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah atau memodifikasi fasilitas fisik yang telah ada di sekolah.

c. Pemerintah dan Masyarakat

Penelitian ini dilakukan di beberapa daerah yaitu Kemadang, Rongkop, Tanjungsari dan Ponjong yang secara geografis berada di wilayah pinggiran kabupaten Gunungkidul sehingga faktor geografis dan faktor ekonomi masyarakat ikut mempengaruhi pelaksanaan pendidikan inklusif di daerah tersebut. Di daerah ini masyarakat cenderung bermata pencaharian sebagai petani dan dapat digolongkan ekonomi menengah. Pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus masih kurang. Mereka masih merasa malu ketika memiliki anak abk dan malah menyembunyikannya. Sedangkan seharusnya anak berkebutuhan khusus pun tetap harus mendapatkan hak yang sama seperti anak normal. Selama ini kegiatan sosialisasi hanya dilakukan oleh sekolah saja sedangkan seharusnya sosialisasi dapat dilakukan oleh Lembaga lain dimasyarakat untuk menguatkan pemahaman orang tua terhadap kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Padahal dukungan masyarakat dalam pelaksanaan Pendidikan inklusif sangat diperlukan.

Dukungan yang diberikan dapat berupa: 1) mengurangi budaya mengolok-olok atau bahkan mengucilkan anak yang berkebutuhan khusus. Seharusnya lingkungan masyarakat dan tempat tinggal anak berkebutuhan khusus ikut mendukung perkembangan anak berkebutuhan tersebut sehingga timbul rasa semangat dan motivasi untuk terus berkembang. 2) Membentuk organisasi yang peduli terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dengan ini diharapkan anak berkebutuhan khusus yang belum dapat mengakses layanan Pendidikan inklusif, dapat dijangkau dan diberikan informasi. 3) Ikut terlibat langsung dalam komite sekolah, sehingga dapat menyampaikan aspirasi masyarakat dan keadaan anak berkebutuhan khusus di masyarakat kepada sekolah serta ikut berperan langsung dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusif. 4) Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas Pendidikan inklusi yang ada dilapangan secara langsung. 5) Masyarakat sebagai stakeholder Pendidikan inklusif, sehingga masyarakat perlu memiliki edukasi tentang penerimaan terhadap anak berkebutuhan khusus agar mereka merasa diterima di masyarakat.

Pemerintah sebagai penentu kebijakan, selama ini telah mendukung kebutuhan peserta didik dengan kebutuhan khusus atau disabilitas dari berbagai bidang terutama dari bidang Pendidikan. Berbagai kebijakan telah ditetapkan dalam pelaksanaan Pendidikan inklusif mulai dari pedoman pelaksanaannya, kebijakan akomodasinya dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan belum berjalan sesuai target dan tujuannya. Data yang ditemukan dilapangan masih banyak sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif yang masih dengan prinsip “yang penting jalan”. Untuk dapat memaksimalkan dukungannya, pemerintah perlu melakukan: 1) Peningkatan system pendataan sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif. Karena di lapangan

masih ada sekolah dengan peserta didik inklusif namun bukan sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif. 2) Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan inklusif agar pelaksanaannya lebih terkontrol dan sesuai peraturan. 3) Menyediakan fasilitas sekolah maupun fasilitas pembelajaran yang layak bagi peserta didik berkebutuhan khusus. 4) Meningkatkan kompetensi guru untuk guru pendamping khusus.

4. KESIMPULAN

Penyelenggaraan pendidikan inklusif sesungguhnya masih perlu dilakukan perbaikan dari berbagai aspek. Komunikasi dengan pemerintah daerah, provinsi maupun pusat sangat diperlukan agar saling mengetahui realitas pelaksanaan pendidikan inklusif sesungguhnya yang ada di lapangan. Bahwasanya di daerah Gunungkidul masih banyak lembaga pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang fasilitasnya belum mencukupi kebutuhan peserta didik dengan kebutuhan khusus.

Sekolah bukanlah lembaga satu-satunya yang wajib melakukan sosialisasi kepada orang tua tentang anak berkebutuhan khusus, jadi kerja sama pihak pemerintah maupun swasta sangat diperlukan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memiliki pikiran terbuka, dapat menerima dan bersinergi untuk kesejahteraan bersama. Implikasi dari penelitian ini adalah timbulnya kesadaran bahwasanya pendidikan inklusif bukan hanya tanggung jawab orang tua saja, namun dukungan dari orang tua, masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan inklusif yaitu memberikan kesempatan pemerataan pendidikan bagi seluruh warga Indonesia baik dengan keadaan normal maupun anak berkebutuhan khusus selain itu dengan adanya pendidikan inklusif seharusnya dapat meningkatkan rasa menghargai sesama dengan berbagai perbedaan.

Penelitian ini telah dilakukan secara maksimal, meskipun demikian terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu teori, referensi dan penggunaan sampel masih sedikit sehingga hasil penelitian belum mewakili cakupan keadaan lapangan yang lebih luas. Selain itu kemungkinan masih ada beberapa variabel faktor pendukung dan penghambat lainnya yang belum ditemukan oleh peneliti. Hal ini dapat dikembangkan dan diteliti lebih lanjut pada penelitian selanjutnya.

5. REFERENSI

- Amponteng, Michael, and Maxwell Peprah Opoku. 2019. "Understanding of Inclusive Education Practices among Parents in Ghana." *Jurnal Of Research and Special Educational Needs* 19(3):207–19.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak.
- Bahri, Syaiful. 2022. "Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar." *EDUKATIF Jurnal Ilmu Pendidikan* 4(1).
- Direktorat Sekolah Dasar. 2022. *BUku Saku Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Sekolah Dasar*.
- Dr. Chandrasaha G. 2022. "Inclusive Education Issues and Challenges of Inclusive Education." *International Journal of Innovative Science and Research Technology* 7(11).
- Dr Archana S. S. 2022. *Analysis of Inclusive Practices of Regular Schools for Promoting Inclusive Education*.

- E.A.Kirillova, and G. Ibragimov. 2016. "The Inclusive Competence of Future Teachers ." *JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CULTURE COMMUNICATIONS AND CONFLICT* 20(2):180` – 185.
- Francis R. Ackah-Jnr, and Joyce B. Danso. 2019. "Examining the Physical Environment of Ghanaian Inclusive Schools: How Accessible, Suitable and Appropriate Is Such Environment for Inclusive Education?" *International Journal of Inclusive Education* 23(2):188–208.
- Garnida, Dadang. 2018. *Pengantar Pendidikan Inklusif*. 2nd ed. edited by D. Sumayyah. Bandung: Refika Aditama.
- Harun, Suzana, Zaharah Hussin, and Abdul Muhsien Sulaiman. 2021. *The Teaching Of Islamic Education Teachers In Inclusive Classes: Current Phenomenon In Forming A New Teaching Model*.
- Junaidi, Ahsan Romadlon, Arif Dewantoro, Pravisi Shanti, and Gama Rahmita. 2022. "Inclusive Education in Higher Education: Baseline Study at Universitas Negeri Malang." *Journal of ICSAR* 6(2):196–204. doi: 10.17977/um005v6i22022p196.
- Kementrian Pendidikan Nasional. 2009. "2009-Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009."
- Mrs. Vidhyashree P. 2019. "SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION IN INDIA: ISSUES AND CHALLENGES." Pp. 60–65 in *Innovative Techniques of School Education and Teacher Education for 21st Century*.
- Mumpuniarti. 2014. *Value-Based Education Model to Build Students of Inclusive Elementary School's Character*. Vol. 2.
- Munajah, Robiatul, Arita Marini, and Mohamad Syarif Sumantri. 2021. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 5(3):1183–90. doi: 10.31004/basicedu.v5i3.886.
- Pemerintah Indonesia. 2020. *PP Nomer 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas*.
- Praptingrum, M. 2010. "Fenomena Pendidikan Inklusif Bagi ABK." *Jurnal Pendidikan Khusus* 7(2).
- Rasmitadila. 2020. *Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Vol. 1. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Sadowa, Iryna. 2019. "INCLUSION AS A NEW SOCIO-EDUCATIONAL PHENOMENON." *KELM. Knowledge, Education, Law and Management* 157–63.
- Subini, Nini. 2014. *Pengembangan Pendidikan Inklusi Berbasis Potensi*. Yogyakarta: Maxima.
- Tarnoto, Nissa. 2016. "PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI PADA TINGKAT SD." *Humanitas* 13(1).
- Wang, Tiantian, Meng Deng, and Guoxiu Tian. 2022. "More Leadership, More Efficacy for Inclusive Practices? Exploring the Relationships between Distributed Leadership, Teacher Leadership, and Self-Efficacy among Inclusive Education Teachers in China." *Sustainability (Switzerland)* 14(23). doi: 10.3390/su142316168.
- Yusuf, Munawir, Maman Sunardi, Haryono Rachman, and Info Artikel. 2014. "The Development of Inclusive Education Management Model To Improve Principals and Teachers Performance in Elementary Schools." *JED The Journal of Educational Development* 2(2).